

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan ekonomi yang selalu mendapat perhatian serius dari pemerintah di seluruh dunia. Bahkan dalam bidang ekonomi, keberhasilan dalam menanggulangi masalah ini oleh pemerintah dari waktu ke waktu telah menjadi persoalan fenomenal untuk diteliti, terlebih lagi jika itu adalah negara yang masih berkembang. Sebagai salah satu negara berkembang Indonesia menyadari betul akan pentingnya permasalahan kemiskinan dan mengusahakan berbagai upaya untuk menekannya dalam agenda tahunan pemerintah, bahkan telah menjadi rencana pembangunan jangka panjang (*masterplan*) untuk menekan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian.¹

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada dasarnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan pendapatan yang layak. Tempat tinggal atau pemukiman yang layak merupakan salah satu standar hidup atau standar kesejahteraan

¹ Muhammad Kholid Nabhan, *Pengaruh Angka Melek Huruf, Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016*, (Skripsi Tidak Diterbitkan: Tulungagung, 2019), hal. 1.

masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat dikatakan dalam kondisi miskin apabila memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah dari rata-rata pengeluarannya sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk menyejahterakan dirinya.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan, antara lain kualitas sumber daya manusia yang rendah, sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik dan benar, jumlah penduduk yang meningkat dengan pesat, kurangnya pengetahuan yang dimiliki untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomian baik di bidang pertanian maupun di bidang perindustrian, tingkat pengangguran yang terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, sektor pertumbuhan ekonomi yang menurun dari tahun per tahun, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan kemiskinan.

Menurut Perpres Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi penanggulangan Kemiskinan, pemahaman mengenai “kemiskinan” mestilah beranjak dari pendekatan berbasis hak (*right based approach*). Dalam pemahaman harus diakui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak-hak yang sama.² Oleh karena itulah, apabila ada seorang atau sekelompok orang yang hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat tidak terpenuhi maka disebut dengan kemiskinan. Lalu merujuk dalam Undang -

² Arif Haryana, *Konsep dan Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Upaya Mendorong Terpenuhinya Hak Rakyat Atas Pangan*, diakses dari <http://bapenas.go.id>, diakses pada 09 Maret 2021.

Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 sendiri sudah diamanatkan bahwa tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sehingga adanya campur tangan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pemerintah sangat menyadari bahwa melalui pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keberhasilan bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya yaitu pertumbuhan tersebut menyebar pada pendapatan, termasuk pada penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor di mana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa padat modal.³

³ Dita Sekar Ayu, *Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur*, (Skripsi Tidak Diterbitkan: Yogyakarta, 2018), hal. 22.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Jawa Timur digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sehingga arah perekonomian daerah akan terlihat jelas. PDRB juga di sini juga berperan sebagai indikator untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai rujukan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang salah satunya untuk mengurangi jumlah kemiskinan.

PDRB per kapita juga sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain, jika pendapatan tinggi dan merata antar daerah maka ketimpangan (kemiskinan) akan berkurang.⁴

Seperti halnya PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun dapat mempengaruhi setiap peningkatan maupun penurunan jumlah kemiskinan. Hal ini karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup 3 dimensi yaitu Umur Panjang dan sehat, Pengetahuan dan Standar Hidup Layak.⁵ Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah

⁴ Nita Tri Hartini, *Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia, Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antara Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015*, (Skripsi Tidak Diterbitkan: Yogyakarta, 2017), hal. 2.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*, diakses dari bps.go.id/page/ipm pada 09 Maret 2021.

kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pun sebaliknya, semakin tinggi IPM maka semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah tingkat IPM pada tiap daerah itu berbeda-beda, hal inilah yang menjadikan IPM salah satu faktor yang berpengaruh pada kemiskinan.

Faktor lain yang berkontribusi pada tingkat kemiskinan yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya pertumbuhan penduduk di suatu daerah yang tidak diimbangi oleh adanya pemerataan perbaikan kualitas pemenuhan kebutuhan penduduk malah akan meningkatkan kemiskinan. Bertambahnya Jumlah Penduduk miskin tanpa terkendali akan menghambat laju proses pembangunan ekonomi. Penduduk merupakan sekelompok manusia yang tinggal di suatu daerah dan waktu tertentu. Kondisi pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara kasar dapat dilihat dari jumlah penduduknya tentu saja dengan mempertimbangkan rata-rata pendapatan seluruh penduduk negara tersebut (*income per capital*). Jumlah Penduduk akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang akan dilakukan karena Jumlah Penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya penambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan NSB (Negara Sedang Berkembang) dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangat terbatas.⁶

⁶ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi ke 4*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2004), hal. 267.

Seperti yang sudah di kemukakan sebelumnya bahwa Jumlah Penduduk mampu mempengaruhi tingkat di suatu wilayah. Dari teori yang dikemukakan oleh Malthus, diketahui bahwa suatu saat pertumbuhan Jumlah Penduduk akan melebihi persediaan bahan makanan. Ketika keadaan ini terjadi maka akan mengakibatkan jumlah bahan makanan menjadi terbatas. Penduduk berpendapatan rendah yang tidak mendapatkan bahan makanan akan menjadi miskin.⁷ Seperti itulah gambaran bagaimana Jumlah Penduduk dalam mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah.

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di pulau Jawa selain Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 47.799,75 km² habis terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, 29 Kabupaten dan 9 Kota. Dengan batas wilayah Provinsi Jawa Timur pada bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Selat Bali, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.⁸

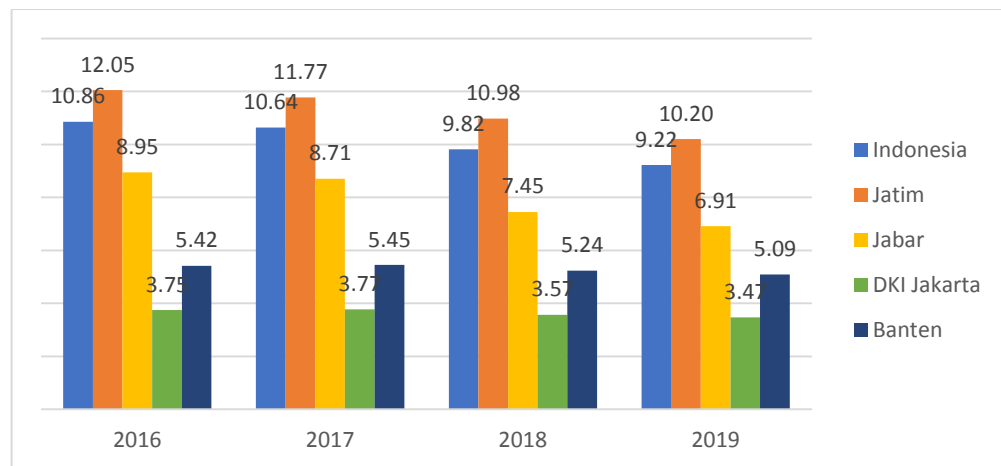
Menurut Wongdesmiwati, faktor – faktor yang mempengaruhi Jumlah Penduduk miskin di antaranya adalah pengangguran, inflasi, indeks

⁷ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 1, No. 02, Mei 2013, hal. 4.

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “*Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2021*”, hal. 4, dalam <https://jatim.bps.go.id/publication>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi.⁹ Dalam penelitian ini peneliti hanya akan meneliti empat faktor dari beberapa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang dikaji adalah produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk.

Grafik 1.1
Data Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah

Dari data Grafik 1.1 di atas diketahui Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki Tingkat Kemiskinan paling tinggi jika dibandingkan dengan beberapa provinsi yang ada di pulau Jawa, seperti provinsi Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, dan Banten. Tingkat kemiskinan tertinggi periode 2016-2019 adalah di provinsi Jawa Timur yaitu 12,05% di tahun 2016 dan tingkat kemiskinan terendah adalah provinsi D.K.I. Jakarta yaitu sebesar 3,47% di tahun 2019.

⁹ Wongdesmiwati, “*Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia : Analisis Ekonometrika*”, dalam <http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinandidi-indonesia-analisis-ekonometri.pdf>, diakses pada 11 Maret 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, di Provinsi Jawa Timur dalam periode 2016-2019 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi rata-rata tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi jika dibanding dengan provinsi-provinsi lain di pulau Jawa. Belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ke seluruh kabupaten/kota menjadi penyebabnya, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi tiap Kabupaten/Kota dalam usaha mengatasi kemiskinan di Jawa Timur. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan menguji teori hubungan Wongdesmiwati tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dengan judul penelitian **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang rendah dapat menghambat pembangunan di suatu daerah dan mengganggu tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Rendahnya indeks pembangunan manusia dapat menghambat potensi sumber daya manusia pada suatu daerah.
3. Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi dapat menyebabkan tingginya kemiskinan.
4. Kemiskinan dapat menyebabkan kelesuan ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin mengetahui: “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur” berdasarkan rumusan masalah tersebut memunculkan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apakah ada pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah ada pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah ada pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah ada pengaruh produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menguji apakah PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menguji apakah IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menguji apakah Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menguji apakah PDRB, IPM, dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur.

E. Kegunaan Penelitian

Sementara itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan guna atau manfaat sebagaimana berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Harapan dari penelitian ini, semoga nantinya mampu memberikan sumbangsih pengetahuan atau informasi tambahan yang berkaitan dengan kajian makro ekonomi yang membahas mengenai kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi indikator yang berguna dalam mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Dengan memahami indikator yang memengaruhi tingkat kemiskinan, pemerintah akan lebih mudah memetakan tentang kondisi riil yang terjadi dan strategi apa yang tepat dan akurat dalam upaya pengentasan masyarakat kurang mampu.

b. Bagi Akademik

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan ekonomi tentang teori ekonomi makro.
- 2) Memberikan sumbangsih perbendaharaan perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkait pengaruh produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan kajian ilmiah dan referensi atau acuan bagi mahasiswa yang akan meneliti kajian masalah yang sama.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan masalah yang diberikan dalam penelitian bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang melebar dalam penelitian. Mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan finansial, maka peneliti memberikan batasan, bahwa penelitian berfokus pada variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), di mana variabel bebas yang dimaksudkan ialah produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk. Sementara itu, variabel terikat dalam penelitian ini ialah tingkat kemiskinan. Penulis memberikan batas masalah hanya pada variabel tersebut. Objek penelitian terbatas pada Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016-2019 dan hanya menganalisis data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini digunakan untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman sehingga dapat menghasilkan persamaan pemikiran terkait dengan variabel-variabel dalam penelitian ini, maka penegasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran tentang istilah-istilah yang terdapat dalam variabel-variabel penelitian. definisi konseptual bersumber dari kamus atau bahan kajian literatur yang relevan dengan penelitian. Sesuai judul pada

penelitian ini, penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Produk Domestik Regional Bruto (X1)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah besarnya produk domestik bruto (PDRB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun persentase. berdasarkan data beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari administrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder).¹⁰

b. Indeks Pembangunan Manusia (X2)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia.¹¹

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_regional_bruto diakses tanggal 12 Desember 2019 pukul 12.15 WIB.

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia diakses tanggal 12 Desember 2019 pukul. 09.41 WIB.

c. Jumlah Penduduk (X3)

Jumlah Penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat dalam wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan yang dianut oleh orang tersebut.¹²

d. Tingkat Keiskinan (Y)

Keiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan¹³

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel bebas yaitu produk domestik regional bruto sebagai variabel X1, indeks pembangunan manusia sebagai variabel X2, jumlah penduduk sebagai variabel X3, dan satu variabel bebas yaitu tingkat kemiskinan sebagai variabel Y.

¹² Saharuddin Didu, Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak, Vol. 6, No.1, April (Jurnal Ekonomi-Qu, 2016), hal. 106.

¹³ Ali Khomsun, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 2.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas maka dalam penelitian ini disusun suatu sistematika penulisan. Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam 3 bagian meliputi:

1. Bagian Awal

Pada Bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Inti

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri atas beberapa subbab, yaitu: latar belakang masalah sebagai landasan pemikiran secara garis besar, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang cakupan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian yang akan dikaji, penelitian terdahulu, konsep kerangka berpikir serta pencantuman hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang mekanisme penelitian yang dilakukan, yang meliputi pendekatan, jenis, populasi sampling, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil yang didapat setelah melakukan penelitian. Dilakukan penyajian data terkait dengan topik dan rumusan pertanyaan yang telah disusun dan hasil dari proses analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan pembahasan atas hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan tahapan-tahapan penelitian dalam metode penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bagian ini merupakan bab akhir dalam sebuah penelitian, yang berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.